

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENUJU PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESA UNGASAN, KABUPATEN BADUNG, BALI

Fredella Eris Putri Krispian¹, I Wayan Suardana², I Made Kusuma Negara³

Email: fredellaputri@gmail.com¹, suardana_ipw@unud.ac.id², kusuma.negara@unud.ac.id³

^{1,2,3}Program Studi Industri Perjalanan Wisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana

Abstract: This study aims to analyze collaborative actors, how collaborative governance is implemented, and its impact on sustainable tourism in Ungasan Village. The data analysis technique used is qualitative through observation, interviews, and documentation with the technique of determining informants using purposive sampling. The results of this research show that there are three main actors, namely the government, the private sector, and society. There are five indicators such as commitment to a common purpose, governance, access to authority, information sharing, and access to resources that are working quite well. However, indicators of network structure, trust among the participants, and distributive accountability/responsibility still need to be evaluated. Collaboraion between actors has a positive impact on the four pillars of sustainable tourism, although improvements are needed, especially in the pillar of environmental sustainability.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktor kolaborasi, bagaimana pelaksanaan *collaborative governance*, serta dampaknya terhadap pariwisata berkelanjutan di Desa Ungasan. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik penentuan informan menggunakan *puposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga aktor utama, yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Terdapat lima indikator seperti *commitment to a common purpose*, *governance*, *access to authority*, *information sharing*, dan *access to resources* berjalan cukup baik. Namun, indikator *network structure*, *trust among the participant*, dan *distributive accountability/responsibility* masih perlu dievaluasi. Kolaborasi antar aktor memberikan dampak positif pada empat pilar pariwisata berkelanjutan, meski perlu adanya peningkatan terutama pada pilar keberlanjutan lingkungan.

Keywords : collaborative governance, sustainable tourism, ungasan village

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai kekayaan, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya. Kekayaan serta keberagaman yang dimiliki Indonesia menjadi potensi dalam dunia pariwisata di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pada 2019, sektor pariwisata menyumbang 5,0% dari pendapatan domestik bruto Indonesia, hal ini didapatkan dari laporan *Tourism Trends and Policies 2022* oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD). Namun, pandemi Covid-19 pada 2020 mengakibatkan penurunan yang signifikan sebesar 56% sehingga hanya

2,2% dari total ekonomi.

Melalui data-data tersebut dapat dikatakan bahwa pariwisata Indonesia mengalami perkembangan. Seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan menyebabkan bertambahnya sarana dan prasana dalam memenuhi kebutuhan wisatawan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah aspek lingkungan. Bukti nyata yang dapat dilihat dari pencemaran lingkungan adalah di Bali, menurut data Badan Lingkungan Hidup Bali, sebanyak 1.000 kubik sampah yang diproduksi di Bali setiap harinya. Pembangunan kepariwisataan yang cenderung dieksploitasi sebagai sektor jasa unggulan untuk kepentingan ekonomi, dan dipasarkan dengan tujuan mendatangkan wisatawan dalam jumlah banyak mengabaikan tujuan pembangunan kepariwisataan itu sendiri

(Pitana & Gayatri, 2005 dalam Saridi et al., 2021:63)

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya konsep dalam pariwisata yang dapat menjaga keberlanjutan. Pariwisata berkelanjutan adalah sebuah konsep pariwisata yang memberikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial budaya, serta ekonomi. Saat ini pemerintah tidak hanya fokus mengejar angka kunjungan wisatawan, tetapi lebih fokus pada usaha mendorong pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang perkembangan pariwisatanya dapat dilihat dan dirasakan oleh setiap orang. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat bahwa pada bulan Juli sebanyak 541.353 wisatawan mancanegara datang ke Bali. Salah satu Desa di Bali yang memiliki destinasi wisata terkenal yaitu Desa Ungasan yang terletak di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Desa Ungasan memiliki beberapa destinasi yang sudah dikenal oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, seperti Pantai Melasti dan Garuda Wisnu Kencana *Cultural Park*.

Bertambahnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Ungasan, mengakibatkan adanya motivasi untuk membangun 4a (*attraction, amenities, accessibility, dan ancillary*) terutama pada akomodasi. Banyaknya pembangunan akomodasi mulai dari homestay hingga hotel berbintang, memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Pada bulan Maret tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung menghentikan sementara pembangunan villa yang berada di Banjar Wijaya Kusuma, Desa Ungasan. Pemberhentian pada proyek ini dikarenakan pihak investor belum memiliki kelengkapan izin serta pembangunan villa tersebut menutup aliran sungai dengan beton yang meresahkan warga setempat. Berdasarkan hal ini, bentuk pengawasan oleh pemerintah pada suatu pembangunan baik sarana maupun prasarana penunjang pariwisata sangat diperlukan. Selain penemuan pembangunan villa yang belum memiliki kelengkapan izin, pada tahun 2023 telah terjadi kasus reklamasi di Pantai Melasti. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung menemukan reklamasi Pantai Melasti pada saat melaksanakan pengecekan ke daerah pesisir Pantai Melasti

pada 20 Juni 2022. Berdasarkan hasil pengecekan, ditemukan adanya gundukan batu kapur yang masuk ke dalam perairan Pantai Melasti serta adanya pengerukan yang diduga reklamasi. Setelah dilakukan pengecekan mengenai izin, pengerjaan pengurukan tebing di Pantai Melasti tidak memiliki izin sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-Undang (UU).

Untuk menghadapi tantangan yang ada di Desa Ungasan, penerapan *collaborative governance* dapat menjadi solusi yang efektif. Kemajuan pariwisata harus didukung serta perlu adanya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan (Pattisiana, 2023). Menurut Utama, dkk (2023) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu proses penyusunan pemerintahan yang mengikutsertakan organisasi pemerintah, swasta dalam pembuatan keputusan yang dilakukan secara musyawarah oleh lebih dari dua pihak. Menurut hasil penelitian oleh Aref., et al (2018) adanya kolaborasi antara pemerintah lokal, masyarakat, serta pemilik usaha pariwisata berhasil mempromosikan pariwisata berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, melalui penelitian ini akan menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan *collaborative governance* dalam menuju pariwisata berkelanjutan di Desa Ungasan, Kabupaten Badung, Bali. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan di Desa Ungasan, Kabupaten Badung, Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia. Desa Ungasan terkenal dengan potensi wisata alam dan taman budaya Garuda Wisnu Kencana *Cultural Park*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode penyeleksian sampel berdasarkan pertimbangan khusus terkait dengan studi kasus yang diteliti serta tujuan penelitiannya (Sugiyono, 2016). Terdapat tiga kelompok sumber informasi pada penelitian ini, yaitu

instansi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat lokal.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, teknik analisis ini merupakan teknik kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan terus menerus berlangsung serta dilakukan dengan tiga tahapan analisis, yaitu reduksi data (*data reduction*), sajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan (*data conclusions drawing/verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Ungasan

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ungasan yang beralamatkan di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Desa Ungasan memiliki luas wilayah 1.542 Ha dan terbagi menjadi 14 banjar dinas. Diberi nama Desa Ungasan karena keberadaan daerahnya yang di ungas atau muncuk atau hidung letaknya di ladang atau bukit menonjol. Desa Ungasan merupakan desa di Kuta Selatan yang memiliki pantai sebagai potensi wisata serta daya tarik wisata buatan Garuda Wisnu Kencana *Cultural Park* yang sudah dikenal oleh wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara.

Aktor-Aktor Pelaksana *Collaborative Governance*

Dalam menjalin sebuah kolaborasi, perlu adanya aktor yang terlibat. Pada penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aktor penting dalam pelaksanaan *collaborative governance*, yakni pemerintah, swasta (pelaku usaha wisata), dan masyarakat lokal yang diwakilkan oleh Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata).

Pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dan Pemerintah Desa Ungasan berperan sebagai koordinator, fasilitator, stimulator, dan motivator. Sektor swasta berperan sebagai penggerak ekonomi lokal dengan menyediakan produk dan jasa yang mendukung pariwisata, seperti transportasi, akomodasi, makanan, hiburan, dan promosi pariwisata. Mereka memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan industri pariwisata di Desa Ungasan. Masyarakat lokal diwakili oleh Desa Adat Ungasan dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Desa adat berperan dalam menjaga tradisi dan mengelola hak-hak adat, sementara

Pokdarwis bertindak sebagai motivator dan penggerak sadar wisata.

Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam membangun pariwisata berkelanjutan di Desa Ungasan

Penelitian ini mengacu pada teori DeSeve (2009) untuk mengukur sejauh mana kolaborasi terbangun berdasarkan delapan indikator keberhasilan *collaborative governance*, yaitu; *networked structure* (struktur jaringan), *commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan), *trust among the participant* (kepercayaan), *governance* (pemerintahan), *access to authority* (akses terhadap kekuasaan), *distributive accountability/responsibility* (pembagian akuntabilitas/tanggung jawab), *information sharing* (berbagi informasi), *access to resources* (akses terhadap sumber daya).

Jaringan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sudah terbentuk. Akan tetapi, terdapat tantangan seperti dominasi peran desa adat serta belum adanya kesepakatan formal untuk memperkuat jaringan. Aktor-aktor kolaborasi memiliki komitmen dalam mengembangkan pariwisata, tetapi belum dituangkan dalam kesepakatan tertulis sehingga fokus lebih lebih pada pelaksanaan peran masing-masing daripada tujuan bersama. Rasa percaya antar aktor belum sepenuhnya terbangun, terutama antara pemerintah dengan pokdarwis. Kepercayaan yang ada hanya menyentuh aspek tertentu, seperti keamanan antara pemerintah dan pelaku usaha. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam memantau pembangunan pariwisata dan berkomunikasi dengan sektor swasta, tetapi masih ada keterbatasan dalam mengelola perizinan, dan hubungan dengan pokdarwis belum optimal karena musyawarah rutin. Setiap aktor memiliki tanggung jawab masing-masing, namun pembagian tanggung jawab belum optimal dan belum disepakati secara bersama, terutama untuk pihak pokdarwis. Keterbukaan informasi sudah berjalan cukup baik melalui *platform digital* seperti *website* dan media sosial. Akan tetapi, forum musyawarah masih kurang optimal dalam memperkuat kolaborasi. Desa Ungasan memiliki potensi sumber daya alam dan infrastruktur yang baik, tetapi sumber daya manusia yakni masyarakat lokal belum mendapatkan pelatihan sadar wisata secara rutin.

Dampak *Collaborative Governance* terhadap Pariwisata Berkelanjutan di Desa Ungasan

Berdasarkan PERMENPAREKRAF NOMOR 14 TAHUN 2016 terdapat empat pilar pariwisata berkelanjutan, yaitu pengelolaan berkelanjutan, ekonomi berkelanjutan, keberlanjutan budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Pada pilar pengelolaan berkelanjutan sudah menunjukkan adanya pemeliharaan fasilitas yang baik. Akan tetapi terdapat kendala dalam penyediaan air bersih yang menjadi perhatian pemerintah. Pada pilar ekonomi berkelanjutan juga menunjukkan dampak yang positif dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi masyarakat. Kerja sama antara pemerintah desa dan sektor swasta memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekonomi. Dampak positif juga terlihat pada pilah keberlanjutan budaya. Budaya Bali tetap dipertahankan meskipun terdapat adaptasi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan internasional, seperti di Pantai Melasti dan GWK *Cultural Park* yang menampilkan budaya tradisional melalui berbagai pementasan. Pada pilar keberlanjutan lingkungan, pengelolaan limbah dan daur ulang sudah berjalan dengan baik, namun Desa Ungasan masih menghadapi tantangan dalam konservasi biodiversitas dan pengurangan jejak karbon. Program *Green Tourism* belum sepenuhnya diterapkan karena Desa Ungasan masih dalam tahap pembangunan pariwisata berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Ungasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kolaborasi untuk membangun pariwisata berkelanjutan di Desa Ungasan, Kabupaten Badung, Bali adalah pemerintah yang terdiri dari Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dan Pemerintah Desa Ungasan, pihak swasta yakni pelaku usaha pariwisata, serta masyarakat yakni Desa Adat Ungasan dengan Pokdarwis Desa Ungasan
- 2) Terkait pelaksanaan *collaborative governance* berdasarkan indikator keberhasilan oleh Deseve dalam Moore (2009) menunjukkan bahwa secara

keseluruhan pelaksanaan kolaborasi antara pihak pemerintah desa, pihak swasta, dan pihak pokdarwis menunjukkan kearah yang positif. Terdapat lima indikator yang sudah berjalan dengan cukup baik namun belum optimal, yakni *commitment to a common purpose, governance, access to authority, information sharing, dan access to resources*. Sedangkan pada indikator *network structure, trust among the participant, dan distributive accountability/responsibility* masih harus dievaluasi dan dioptimalkan kembali.

- 3) Berdasarkan empat pilar pariwisata berkelanjutan, yaitu pengelolaan berkelanjutan, ekonomi berkelanjutan, keberlanjutan budaya, dan keberlanjutan lingkungan adanya kolaborasi antar setiap aktor memberikan dampak yang positif. Meskipun kolaborasi belum berjalan secara optimal, namun dengan peran yang dimiliki dan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah membuat pariwisata berkelanjutan di Desa Ungasan sudah terencana.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran praktis yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan menuju pariwisata berkelanjutan di Desa Ungasan yaitu :

- 1) Mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi membangun pariwisata berkelanjutan di Desa Ungasan sudah cukup memenuhi kebutuhan pariwisata, namun alangkah lebih baiknya apabila dinas lainnya seperti Dinas Kebudayaan dan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilibatkan.
- 2) Terkait kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah desa, pihak swasta, dan pokdarwis membuat kesepakatan dan perjanjian tertulis yang mana isinya mencakup adanya komitmen kerja sama, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, penting untuk mengadakan pertemuan forum musyawarah secara rutin dengan melibatkan pemerintah desa, pihak swasta, dan pihak pokdarwis agar setiap perkembangan informasi serta aspirasi program dapat disampaikan dengan baik. Selanjutnya, diadakan pelatihan atau sosialisasi untuk masyarakat lokal

mengenai sadar wisata.

- 3) Pada masa penjajakan dalam membangun pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan keempat pilar tersebut, penting adanya hubungan yang kuat antar para aktor untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Selain itu, salah satu pilar yang menjadi fokus utama yaitu lingkungan berkelanjutan, alangkah lebih baik apabila perizinan membangun suatu bangunan dapat diawasi secara langsung oleh pihak pemerintah agar semuanya berjalan menurut aturan yang sudah ada.

Referensi

- Endah Dwi Lestari, Y. B. (2023). Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Biak. *Journal of Economics Review (JOER)*, 24.
- Enggar Dwi Cahyo, W. N. (2019). Peran Sektor Pemerintah dan Swasta dalam Perkembangan Destinasi Wisata di Kabupaten Pulau Morotai. *ResearchGate*, 3.
- Gede Rai Amerta Nara Utama, K. A. (2023). *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Ekowisata Subak di Desa Wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. *Business and Notary*, 125.
- I Made Adikampana, I. N. (2017). Arahkan Produk Pariwisata Berbasis Masyarakat Lokal di Wilayah Perdesaan. *Jurnal IPTA*, 96-98.
- Iman Surya, S. N. (2021). *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus: Wisata Kebun Teh Nglinggo). *Pemerintahan dan Politik Islam*, 194.
- Kresnanda Yuliono, I. N. (2022). Peran Dinas Pariwisata Provinsi Bali Dalam Implementasi CHSE pada Hotel dan Restoran di Bali. *Jurnal IPTA*, 2.
- Ni Made Angeliana Suwantara Putri, P. E. (2024). *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata Pinge Kecamatan Marga. *Business and Investment Review (BIREV)*, 51-55.
- Pattisiana, V. (2023). Strategi *Collaborative Governance* dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. *Public Policy*, 66.
- Permatasari, I. A. (2022). Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung. *Kertha Wicaksana*, 37.
- Rahman, A. F. (2023). *Collaborative Governance* Dalam Perkembangan Pariwisata Di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Utara. 45.
- Restina Safitri, R. S. (2023). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tanjungpinang (Studi Tanjung Siambang). *Jurnal Hukum dan Politik*, 64.
- Riska Aprilia Mokoginta, R. P. (2020). Pengembangan Kawasan Wisata Bahari (Studi : Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur). *Jurnal Spasial*, 326.
- Sinaga, R. M. (2021). *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru. 36.
- Suadnyana, I. W. (2023, 5 29). Kronologi Kasus Reklamasi Pantai Melasti Berujung Penetapan 5 Tersangka. From detikbali: <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6744847/kronologi-kasus-reklamasi-pantai-melasti-berujung-penetapan-5-tersangka>
- Sudrajad, Y. (2023, Mei 9). Keindahan pantai Melasti dengan pasir putihnya. From Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-balinusra/baca-artikel/16107/Keindahan-pantai-Melasti-dengan-pasir-putihnya.html>
- Sudrajad, Y. (2023, Juni 2). Garuda Wisnu Kencana yang gagah menawan. From Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-balinusra/baca-artikel/16201/Garuda-Wisnu-Kencana-yang-gagah-menawan.html>
- Tika Mutiarawati, S. (2021). *Collaborative Governance* dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik*, 87.